

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT NO 3 TAHUN 2009 TENTANG
PENGELOLAAN TERUMBU KARANG**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

**Oleh:
RAVINDO
1310841038**



**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

ABSTRAK

Ravindo, 1310841038, Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2018. Dibimbing oleh: Kusdarini, S.AP, M,Si dan Ilham Aldelano Azre, S.IP, M.A. Skripsi ini terdiri dari 165 halaman dengan referensi 11 buku teori, 5 buku metode, 1 skripsi, 2 jurnal, 1 Peraturan Daerah, dan 3 website internet.

Kerusakan terumbu karang akibat pemanfaatan yang tidak baik membuat pemerintahan Sumatera Barat mengeluarkan aturan guna mengatur tatacara pengelolaan terumbu karang dikawasan Sumatera Barat berupa Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang dengan tujuan agar Terpeliharanya kelestarian terumbu karang sebagai basis penunjang pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan, Tercapainya pemanfaatan sumber daya terumbu karang secara rasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, Terciptanya sistem dan mekanisme Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat, dan Terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa lingkungan terumbu karang. Berdasarkan fenomena dimana dalam pengelolaan terumbu karang masih belum denan baik yang membuat kerusakan terumbu karang semakin meningkat, maka peneliti tertarik untuk melihat Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang peneliti gunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn. Menurut Van Meter & Van Horn ada enam variabel yang pengaruhi pelaksanaan kebijakan antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, faktor lingkungan ekonomi, sosial dan politik dan disposisi implementor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari 7 tahapan pengelolaan terumbu karang yaitu, perizinan, pemanfaatan, rehalibitasi, pemberdayaan msyarakat, pengawasan, kearifan lokal, dan kerja sama antar daerah. Masih ada beberaa tahapan yang masih terkendala dalam pelaksanaannya. Pada tahapan pemberdayaan masyarakat standar dan sasaran kebijakan belum berjalan dengan baik. selain itu pada tahapan pengawasan ditemukan bahwa standar dan sasaran kebijakan yang belum terlaksana, kurang dukungan sumber daya, komunikasi antar organisasi pendukung yang belum terjalin dengan baik. Dan adanya tahapan lain seperti pada organisasi pengelola yang khusus untuk mengelola terumbu karang dan kerja sama antar daerah belum terlaksana menjadi kendala lainnya yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang belum terlaksana dengan baik

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Perda Pengelolaan Terumbu Karang,

ABSTRAC

Ravindo, 1310841038, The Implementation Local Regulation of Province West Sumatera number 3 of 2009 concernig management of coral reefs, Department of Publik Administration, Faculty Sosial and Political Science, Andalas University, Padang, 2018. Guided By : Kusdarini, S.AP, M,PA and Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA, This Thesis consist of 165 page with 11 references, 5 method books, 1 thesis, 2 Journal, 1 Regional Regulations, and 3 internet websites

Damage to coral reefs due to improper use makes the West Sumatra government issue rules to regulate the management of coral reefs in the West Sumatra region in the form of the West Sumatra Local Regulation number 3 of 2009 concerning Coral Reef Management with the aim of preserving coral reefs as a basis for supporting resource utilization sustainable fish, Achievement of rational use of coral reef resources to improve the welfare of coastal communities, Creation of systems and mechanisms for community-based coral reef management, and Creation of legal certainty in the utilization of economic potential and environmental services of coral reefs. Based on the phenomenon where in the management of coral reefs is still not good that makes damage to coral reefs increases, the researchers are interested to see the Implementation of West Sumatra Local Regulation number 3 of 2009 concerning Coral Reef Management by the Department of Marine and Fisheries of West Sumatra Province.

The results of the study show that the Implementation of West Sumatra local Regulation No. 3 of 2009 concerning Coral Reef Management has not been well implemented. This can be seen from 7 stages of coral reef management, namely, licensing, utilization, rehabilitation, community empowerment, supervision, local wisdom, and cooperation between regions. There are still several stages that are still constrained in its implementation. At the stage of community empowerment standards and policy targets have not gone well. in addition, at the supervision stage it was found that the standards and objectives of the policies that had not been implemented, lack of support of resources, communication between supporting organizations that had not been well established. And the existence of other stages such as the special management organization to manage coral reefs and cooperation between regions has not yet been implemented, another obstacle that causes the Implementation of West Sumatra local Regulation No. 3 of 2009 concerning Coral Reef Management has not been implemented well

Keyword : Policy Implementation, Local Regulation Management Of Coral Reefs

